

Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Protokol Covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat

Lalu Sulaiman

Fakultas Kesehatan, Universitas Qamarul Huda Badaruddin; sulaimanlalu@gmail.com

Sastrawan Sastrawan

Fakultas Kesehatan, Universitas Qamarul Huda Badaruddin; sastrawan@gmail.com (koresponden)

Sulwiyatul Kamariyah Sani

Fakultas Kesehatan, Universitas Qamarul Huda Badaruddin; sulwiyatul@gmail.com

Menap Menap

Fakultas Kesehatan, Universitas Qamarul Huda Badaruddin; menap@gmail.com

ABSTRACT

Since the confirmation of 2 Indonesian citizen positive with Covid-19 on March 2, 2020, it has made Indonesian people in panic. Indonesian had responded to the arrival of these outbreak excessively. At the beginning of this outbreak, the people was quite obedient in implementing health protocols. However, gradually, the level of community compliance began to decline. People mobilization is still high even large-scale social restrictions have been implemented. The number of people affected by Covid-19 is increasing day by day. Therefore, the aim of this study is to determine the factors that affect the decrease in community compliance in implementing the Covid-19 health protocols. This research was conducted using a descriptive-qualitative method. Data were collected through in-depth interviews with 12 participants. In addition, data was collected by direct observation. Data analysis was performed using constant comparison content analysis. From the results of this study, it was found that factors that affect the decrease in public compliance in implementing the Covid-19 protocols are: public perception of Covid-19, religious understanding, euphoria about the new normal era, confusion of the information about Covid-19 and social-economic and political factor. Based on the results of this study, it is recommended that the government should build a special communication design that there is no confusion in public's perceptions and opinions about the Covid-19.

Keywords: covid-19; health protocol; compliance

ABSTRAK

Sejak terkonfirmasi 2 orang Warga Negara Indonesia positif Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020 membuat rakyat Indonesia menjadi panik. Pada awal kedatangan pandemi ini, masyarakat cukup patuh dalam melaksanakan protokol kesehatan 3M (menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Akan tetapi seiring berjalannya waktu, tingkat kepatuhan masyarakat mulai menurun. Mobilisasi masyarakat juga masih tinggi meskipun pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah diterapkan di berbagai kota. Jumlah yang terkonfirmasi positif juga semakin meningkat setiap harinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Sebanyak 12 orang berpartisipasi dalam penelitian ini yang terdiri dari sasaran primer dan sasaran sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 12 orang partisipan. Selain itu data dikumpulkan secara observasi langsung di lapangan. Analisa data dilakukan dengan *metode constant comparison content analysis*. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol Covid-19 adalah: Persepsi masyarakat akan keberadaan Covid-19, pemahaman keagamaan terkait wabah, euforia tentang *new normal*, kesimpang-siuran informasi tentang Covid-19 dan faktor sosial-ekonomi dan politik. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar pemerintah membuat rancangan komunikasi secara khusus agar tidak terjadi kesimpang-siuran persepsi dan opini masyarakat tentang keberadaan Covid-19 ini, sehingga mereka patuh melaksanakan protokol kesehatan.

Kata kunci: covid-19; protokol kesehatan; kepatuhan

PENDAHULUAN

Selama bulan Desember 2019, terjadi peningkatan jumlah pasien yang menderita pneumonia di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina dengan penyebab yang belum diketahui pasti.⁽¹⁾ Penyakit ini kemudian menyebar dengan cepat dari Wuhan ke wilayah lain. Pada awal Januari 2020, otoritas kesehatan Cina mengumumkan bahwa *coronavirus* jenis baru telah teridentifikasi berdasarkan hasil *swab* pasien yang terpapar penyakit tersebut. Virus ini kemudian dikenal dengan *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) dan penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ini disebut sebagai Covid-19.⁽²⁾ Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan Covid-19 sebagai masalah darurat kesehatan masyarakat internasional.^(1,3) Berbagai bentuk respon dalam rangka pengendalian penyakit tersebut telah dilakukan oleh berbagai Negara di dunia.⁽⁴⁾

Saat kasus Covid-19 di Cina meningkat tajam dari bulan Desember 2019 hingga Februari 2020, Indonesia melaporkan belum ada kasus yang terjadi. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo melaporkan adanya 2 kasus positif Covid-19 yang terdeteksi pertama kali di Indonesia.^(5,6) Per 2 April 2020, kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia melonjak tajam hingga mencapai 1790 kasus dengan 113 kasus baru, 170 kematian, dan 112 sembuh. Dari hasil pemantauan gugus Covid-19, penyebaran Covid-19 terus menerus bertambah setiap harinya. Sebagai salah satu negara dengan populasi besar di dunia, kasus Covid-19 di Indonesia diprediksi akan bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan negara yang populasi penduduknya lebih sedikit.⁽⁴⁾

Berbagai strategi telah dilakukan pemerintah Indonesia guna menekan angka penyebaran kasus Covid-19. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan strategi *physical distancing* sebagai salah satu strategi utama pengendalian Covid-19 disusul dengan diberlakukannya empat strategi baru sebagai langkah penguatan strategi dasar yaitu pemakaian masker di area publik, penelusuran kontak tracing menggunakan *rapid test*, edukasi dan penyiapan isolasi mandiri, dan isolasi di rumah sakit jika isolasi mandiri tidak dimungkinkan.⁽⁷⁾ Namun penerapan kebijakan dan strategi tersebut belum memberikan hasil yang signifikan dalam menekan angka penyebaran Covid-19.

Pemerintah selanjutnya menerapkan kebijakan yang disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah yang dikategorikan sebagai zona merah, wilayah dengan angka kasus covid-19 tertinggi guna menekan mobilitasi masyarakat agar penyebaran Covid-19 dapat ditekan.⁽⁸⁾ Namun setelah PSBB diterapkan ternyata masih banyak pelanggaran yang terjadi. Mobilisasi masyarakat yang terpantau dari satelit juga masih tinggi.⁽⁹⁾ Beberapa bulan kemudian dimana kasus Covid-19 di Indonesia masih belum mengalami penurunan, pemerintah menerapkan kebijakan yang disebut sebagai era *new normal* dengan berbagai relaksasinya yang menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan semakin menurun. Masyarakat yang berkerumun baik yang ada di tempat-tempat ibadah maupun di tempat-tempat umum mulai mengabaikan pelaksanaan protokol kesehatan.

Penerapan kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian kasus Covid-19 tidak akan terlaksana dengan maksimal bila tidak ada kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Menurut Blass (1999) kepatuhan adalah menerima perintah-perintah dari orang lain.⁽¹⁰⁾ Lebih lanjut menurut Taylor (2006) kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain.⁽¹¹⁾ Notoatmodjo (2003) juga mendefinisikan bahwa kepatuhan adalah salah satu perilaku pemeliharaan kesehatan yaitu usaha seseorang untuk memelihara kesehatan atau menjaga kesehatan agar tidak sakit dan usaha penyembuhan apabila sakit.⁽¹²⁾

Banyak hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang. Blass (1999) menguraikan bahwa ada tiga hal yang nantinya bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan yaitu kepribadian, kepercayaan, dan lingkungan.⁽¹⁰⁾ Selain itu, Neil (2000) juga mengungkapkan bahwa pemahaman tentang instruksi, kualitas interaksi, isolasi sosial dan keluarga, serta keyakinan dan sikap merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan seseorang.⁽¹³⁾ Kozier (2010) juga mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan antara lain motivasi untuk sembuh, gaya hidup, pengaruh budaya, kualitas pelayanan kesehatan serta faktor individu dan keluarga.⁽¹⁴⁾

Berdasarkan uraian diatas peneliti kemudian tertarik untuk mengeksplorasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol Covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk memetakan faktor-faktor yang berada dalam cakupan sosial ekonomi, politik dan religi yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada bulan April sampai Juli 2020. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan *constant comparison content analysis*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang direkam dan dibuatkan transkripnya secara verbatim. Transkrip dibaca berulang-ulang untuk dapat memahami secara utuh konten yang ada pada setiap paragraf. Setiap konten baru diberikan kode yang memudahkan retrieval pada proses analisa dan penulisan. Berdasarkan hasil koding selanjutnya dilakukan kategorisasi untuk menentukan tema berdasarkan ciri dan jenisnya.

Jumlah informan sebanyak 12 orang yang dipilih secara *criterion based selection* yang dibagi menjadi dua kategori yaitu sasaran primer dan sekunder (*typical group*). Pemilihan informan yang termasuk *typical group* dilakukan berdasarkan kredibilitas dan tingkat pemahamannya terhadap permasalahan yang akan diteliti. Sasaran primer pada penelitian ini adalah masyarakat umum sedangkan sasaran sekunder adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 12 orang partisipan.

HASIL

Persepsi Masyarakat akan Keberadaan Covid-19

Dari sudut pandang masyarakat, mereka beranggapan bahwa Covid-19 bukan penyakit wabah. Masyarakat terutama yang berusia lanjut dan pernah mengalami wabah sebelumnya seperti kolera, campak maupun cacar

mengatakan bahwa penularan Covid-19 tidak seganas wabah pada zaman dahulu. Anggapan mereka bahwa jumlah penduduk yang terkena penyakit ini sangat kecil. Seorang informan mengatakan:

.....*"Dahulu yang namanya wabah hampir separuh penduduk satu kampung atau suatu desa terkena penyakit apakah itu kolera, campak atau cacar. Kasusnya hampir merata. Nah sekarang Covid-19 ini kan tidak merata. Di suatu desa kasusnya paling-paling ada satu atau dua, akan tetapi sudah dikatakan zona merah"*.

Selain itu, ada juga informan yang mengatakan bahwa penyakit ini hanya ada di media sosial bukan di masyarakat. Mereka mengatakan bahwa Covid-19 bukan penyakit yang berbahaya yang perlu ditakuti. Menurut mereka kematian yang ditimbulkan oleh Covid-19 ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan wabah-wabah yang terjadi sebelumnya. Kematian akibat Covid-19 inipun menurut mereka bukan hanya disebabkan Covid-19 melainkan pasien-pasien yang meninggal kebanyakan berusia lanjut dan disertai dengan penyakit bawaan. Seorang informan mengatakan:

.....*"Dahulu waktu terjadi wabah kolera hampir semua penduduk suatu desa atau kampung terkena dan hampir setiap jam ada jenazah yang dimakamkan, begitu juga saat terjadi wabah campak dan cacar. Covid-19 ini tidak seperti itu, jadi untuk apa kita terlalu takut"*.

Ketika mereka bandingkan keganasan wabah Covid-19, maka mereka beranggapan bahwa dampak Covid-19 ini belum seberapa dibandingkan dengan wabah-wabah yang pernah terjadi.

Pemahaman Keagamaan

Sejak awal masuknya Covid-19 di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa agar masyarakat tidak melaksanakan ibadah secara berjamaah di tempat ibadah selama wabah berlangsung. Masyarakat dihimbau agar beribadah atau sholat di rumah saja dalam rangka mencegah transmisi penyakit ini ditengah-tengah masyarakat. Akan tetapi fatwa ini tidak serta merta dipatuhi oleh masyarakat. Fakta ini dapat diketahui dari kondisi di lapangan dimana sebagian besar tempat-tempat ibadah di desa-desa terutama yang jauh dari jalan raya masih melaksanakan sholat secara berjamaah terutama sholat jumat. Ada indikasi untuk menghindari upaya penegakan hukum oleh aparat dengan cara mematikan pengeras suara agar tidak menarik perhatian petugas keamanan.

Hasil pengamatan di lapangan memperlihatkan sekitar 80% tempat ibadah masih dibuka untuk sholat berjamaah terutama sholat jumat. Mereka sengaja tidak menggunakan pengeras suara agar tidak disidak oleh aparat berwajib. Keadaan ini sama saja dengan apa yang terjadi di Jawa Timur. Mushola-mushola yang ada di kompleks perumahan diubah fungsinya menjadi masjid untuk melaksanakan sholat jumat secara sembunyi-sembunyi tanpa menggunakan pengeras suara. Padahal umumnya setiap kompleks perumahan dihuni oleh kaum intelektual yang seharusnya bisa berfungsi sebagai agent of change untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang terkait dengan upaya pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Seorang informan mengatakan bahwa:

.....*"kami tetap sholat jumat berjamaah hanya tidak menggunakan pengeras suara."*

Setelah dilakukan probing, ternyata di lokasi tersebut terdapat para tokoh agama (Ustadz/Tuan Guru) panutan masyarakat yang memiliki pemahaman keagamaan yang berbeda dengan MUI sehubungan dengan upaya penanggulangan Covid-19. Seorang informan mengatakan:

.....*"Saya tidak takut sama corona, Allahlah yang harus ditakuti". Apapun jenis musibah yang akan menimpa kita tergantung dari izin Allah SWT. Kalau Allah sudah menghendaki saya akan terkena corona, apapun upaya yang saya lakukan tidak akan berguana. Apakah mau gunakan masker, jaga jarak, atau menghindari kerumunan, itu tidak akan berguna kalau Allah sudah menghendaki kalau saya akan terkena penyakit"*.

Peneliti juga ikhtiar manusia dalam menghindari bahaya atau wabah. Dalil yang dikemukakan oleh MUI mengatakan bahwa menghindari mudharat lebih baik daripada mencari maslahat. Dalil ini menjadi dasar peneliti mengajukan pertanyaan: "apakah beribadah di masjid atau tempat ibadah lainnya akan lebih baik daripada beribadah di rumah bila akan menjadi penyebab kita tertular virus corona?". Informan menjawab:

.....*"Kalau nanti kita meninggal dunia, apakah MUI akan membantu kita menjawab pertanyaan malaikat?. Kitalah masing-masing yang akan menjawab pertanyaan malaikat yang mengatakan: mengapa kamu tidak melaksanakan sholat jumat berjamaah gara-gara corona? Bukankah ada dalil yang mengatakan bahwa kalau kita tidak melaksanakan sholat jumat tiga kali berturut-turut maka kita masuk golongan munafik? Nah sekarang apakah kita lebih takut mati karena corona atau mati dalam keadaan munafik?"*.

Ada juga informan yang mengatakan:

.....*"Hidup kita di dunia ini sudah ada ketentuannya, hidup-mati, nasib baik-nasib buruk, jodoh dan rezeki sudah tertulis sejak kita masih dalam kandungan ibu. Lalu apa yang harus dikhawatirkan? Corona dari Allah, Allahlah yang menentukan siapa yang akan terdampak."*

Beginilah berbagai bentuk pemahaman keagamaan masyarakat terkait dengan upaya penanggulangan Covid-19. Nampak ada perbedaan pemahaman keagamaan masyarakat di suatu wilayah tertentu sehingga fatwa MUI tidak dijalankan. Para kyai (ulama lokal) yang berpendapat seperti tersebut diatas, lebih dipatuhi dari pada fatwa MUI. Akibatnya masih banyak masyarakat yang tidak patuh melaksanakan protokol kesehatan (terutama menghindari kerumunan) dalam rangka mencegah penularan Covid-19.

Euforia tentang New Normal

Setelah isu *new normal* mulai bergulir, kebanyakan masyarakat meresponnya dengan euforia. Mereka merasa senang dan gembira setelah sekian lama mereka merasa jenuh berdiam di rumah saja. Isu tentang *new normal* ternyata ditanggapi beragam oleh berbagai lapisan masyarakat. Ada yang menanggapinya sesuai konsep *new normal* dan masih taat dalam melaksanakan protokol Covid-19. Ada pula yang menanggapi sebaliknya. Mereka mengira dengan diterapkan *new normal* ini tidak perlu lagi melaksanakan protokol Covid-19. Banyak masyarakat yang lalai bahkan berhenti melaksanakan protokol Covid-19. Seorang informan mengatakan:

..... *"ya untuk apa kita jaga jarak atau tetap pakai masker kan pemerintah sudah menyatakan bahwa kita sudah kembali ke keadaan normal seperti dahulu"*.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa di pasar-pasar atau tempat-tempat umum masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Bahkan saat ada hajatan, tahlilan atau acara keluarga, mereka jarang memakai masker dan tidak lagi menjaga jarak. Kondisi ini sangat kontras dengan masa awal tanggap darurat Covid-19 dimana acara pernikahan pun harus dihadiri dengan jumlah yang terbatas sesuai ketentuan gugus kendali Covid-19. Kelompok yang salah memahami tentang kebijakan *new normal* inilah yang semakin memperbanyak jumlah masyarakat yang tidak patuh melaksanakan protokol Covid-19.

Kesimpangsiuran Informasi tentang Keberadaan Covid-19

Adanya berbagai bentuk pernyataan di media sosial baik yang konstruktif maupun yang dekonstruktif bagi upaya penanggulangan Covid-19 yang membuat persepsi dan pemahaman masyarakat menjadi terbelah. Fakta ini dapat kita lihat dari perdebatan diantara mereka baik dari kelompok yang pro maupun yang kontra dalam berbagai bentuk pernyataan baik di media sosial maupun perdebatan secara langsung. Perdebatan ini dapat diobservasi langsung dari adanya kerumunan masa pada acara-acara keagamaan atau acara-acara adat di masa relaksasi.

Kesimpangsiuran ini menjadi lebih nyata akibat adanya oknum pejabat publik di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang mengeluarkan statement bahwa Covid-19 tidak berbahaya, penyakit ini bisa disembuhkan dengan bahagia⁽¹⁵⁾ Pernyataan ini sangat dipercayai terutama oleh masyarakat awam. Sebab yang berpendapat adalah pejabat yang dianggap ahli dibidangnya.

Akibat dari kesimpangsiuran informasi ini, masyarakat merasa semakin yakin bahwa adanya pernyataan di media sosial yang mengatakan bahwa Covid-19 adalah sebuah konspirasi benar adanya. Mereka menjadi acuh tak acuh dalam melaksanakan protokol Covid-19. Seorang sopir agen travel mengatakan:

..... *"saya sekarang sudah tidak lagi terlalu patuh pada protokol Covid-19 setelah mendengar pernyataan oknum pejabat yang bisa dipercaya"*.

Ini adalah salah satu contoh dari komponen masyarakat yang mulai yakin bahwa Covid-19 tidak berbahaya sehingga dia tidak lagi memakai masker dan tidak menyediakan hand sanitizer di mobilnya.

Faktor Sosial-Ekonomi dan Politik

Upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat penularan Covid-19 tidaklah gampang. Covid-19 bukan hanya permasalahan kesehatan, tetapi masalah sosial ekonomi dan politik. Masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan merupakan hal yang bersifat dilematis. Sangat sulit untuk memastikan mana yang seharusnya diberi prioritas untuk ditanggulangi. Keduanya merupakan hal yang urgent dan saling terkait seperti lingkaran setan. Di saat ada himbauan pemerintah untuk mengurangi mobilitas (diam dirumah saja), mereka yang kurang mampu mengatakan:

..... *"kalau saya dirumah saja, saya dan keluarga saya mau makan apa? Ujung-ujungnya nanti kami sekeluarga juga akan mati bukan karena Covid-19 akan tetapi mati kelaparan"*

Adanya upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi inilah yang mengakibatkan mobilitas masyarakat sulit terbandung. Pasar tetap ramai dikunjungi walaupun ada kebijakan penutupan pasar dalam waktu tertentu. Salah seorang diantara mereka ada yang berkata:

..... *"pemerintah boleh melarang saya ke pasar asal kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sekolah anak saya ditanggung oleh mereka"*.

Dengan alasan semacam ini membuat pemerintah sulit mencegah aktifitas ekonomi masyarakat untuk melakukan transaksi jual-beli di pasar. Mereka umumnya tidak peduli dengan protokol kesehatan dan berperilaku seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Pernyataan yang bersifat politik juga sering muncul dari oknum-oknum tertentu. Ada diantara mereka yang mengatakan bahwa *"Covid-19 ini adalah penyakit politik yang sekedar untuk menghabiskan anggaran negara"*. Ada juga yang berpendapat bahwa Covid-19 ini sengaja dibesar-besarkan di media masa atau media sosial untuk tujuan tertentu. Orang-orang yang membuat pernyataan semacam ini terkadang bukan orang sembarangan, akan tetapi merupakan tokoh panutan masyarakat yang sudah dianggap memiliki kredibilitas. Inilah yang menyebabkan pemahaman masyarakat tentang Covid-19 menjadi terpecah, ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya akan keberadaan Covid-19.

Bersatunya Jokowi dan Prabowo dalam pemerintahan bukan berarti perseteruan politik antara pendukung fanatik kedua pihak di dunia maya telah selesai. Isu-isu seputar Covid-19 menjadi peluru yang sangat ampuh untuk

menjatuhkan pihak tertentu yang dilakukan dengan penyebaran berbagai berita hasil fabrikasi (*hoax*). *Hoax* semacam inilah yang mempengaruhi pikiran, pemahaman, persepsi dan opini sebagian masyarakat tentang Covid-19 sehingga kepercayaan masyarakat pada pemerintah tentang keberadaan Covid-19 makin menurun.

Beberapa pemberitaan di media massa mengatakan bahwa Covid-19 tidak menular melalui hidung dan mulut akan tetapi Covid-19 menular melalui mata dan telinga. Oleh karena itu masyarakat tidak perlu jaga jarak dan memakai masker. Ada juga yang mengatakan bahwa Covid-19 merupakan sebuah konspirasi untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan yang lebih besar. Disini petugas kesehatan yang berjuang di garis depan dengan mempertaruhkan keselamatannya sering menjadi korban fitnah yang dibuat oleh oknum tertentu. Observasi peneliti menemukan bahwa setiap ada pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang diumumkan di suatu fasilitas pelayanan kesehatan akan diikuti dengan postingan sarkasme di sosial media seperti “cair...cair...”. Ungkapan ini peneliti yakini sebagai “olokan” yang mengandung arti bahwa semakin banyak pasien Covid-19 terkonfirmasi positif akan semakin memperbesar keuntungan/jasa yang diperoleh oleh para petugas medis.

Seorang informan mengatakan:

.....*“Saat ini kalau pasien panas-panas sedikit dan masuk rumah sakit, pasti akan menjadi corona”*
(*terdiagnosa corona:pen*).

Beginilah anggapan mereka terhadap para petugas medis yang seakan sengaja mendiagnosa pasien sebagai Covid-19 tanpa bukti medis yang jelas demi memperoleh keuntungan tertentu. Padahal hampir semua petugas medis di seluruh Indonesia telah bersumpah bahwa mereka tidak melakukan konspirasi semacam ini.

Secara politik, isu miring tentang Covid-19 sengaja dihembuskan dengan tujuan tertentu. Ada seorang informan mengatakan bahwa isu-isu miring tentang Covid-19 sengaja dihembuskan terutama di media sosial dengan tujuan menurunkan kewibawaan pemerintah.

PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat akan Keberadaan Covid-19

Persepsi masyarakat tentang keberadaan pandemi Covid-19 ternyata tidak hanya terbentuk oleh informasi yang diterima dari berbagai sumber, tetapi lebih banyak terbentuk dari pengalaman yang sejenis setiap individu pada masa lampau. Banyak masyarakat yang tidak setuju jika Covid-19 dinyatakan sebagai wabah. Hal ini didasari oleh pengalaman mereka menghadapi wabah campak (*edeh: Sasak*), kolera dan cacar di masa lalu. Mereka yang sudah mengalami wabah penyakit dimasa lampau mengatakan bahwa covid-19 bukan merupakan wabah. Disaat terjadi wabah zaman dahulu seperti wabah kolera dan lainnya, dimana-mana setiap kampung dan desa ada kasusnya, setiap saat siang-malam ada jenazah yang dimakamkan. Sementara saat ini kasus covid-19 sangat jarang terjadi, kalau ada satu kasus perdesa, kematiannya pun kecil sehingga tidak layak dikatakan sebagai wabah. Dengan pengalaman semacam ini maka respon mereka dalam menghadapi Covid-19 saat ini sangat berbeda dengan respon saat menghadapi wabah penyakit di masa lalu. Bahkan ada diantara mereka yang mengatakan bahwa covid-19 ini merupakan penyakit politik yang sengaja dibesar-besarkan dengan tujuan tertentu. Atas dasar perbandingan inilah sikap dan perilaku masyarakat dalam menghadapi covid-19 menjadi acuh-tak acuh.

Saat ini Covid-19 dianggap tidak nyata. Ada kecenderungan untuk meremehkan keadaan yang ada, bukan hanya dari sisi kegawatannya, tetapi juga dari segi jumlah penderita. Sebagai contoh, beberapa informan yang diwawancara meragukan status wabah apalagi hanya satu atau 2 orang perdesa yang terkena Covid-19. Lalu pantaskah ini disebut wabah?

Seperti tersebut diatas, ternyata cara memahami atau mempersepsikan sesuatu bukan semata-mata berdasarkan informasi atau fakta yang terjadi saat ini akan tetapi sangat tergantung pada pengalaman masa lalu.⁽¹⁶⁾ Selain itu, salah satu faktor internal yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah pengalaman.⁽¹⁷⁾

Ada kelompok masyarakat yang sengaja mengambil paksa jenazah keluarganya yang terkonfirmasi Covid-19 di Rumah Sakit. Mereka tidak setuju apabila keluarganya yang meninggal tersebut dimakamkan sesuai protokol pemakaman Covid-19. Mereka membuat pernyataan bermaterai bahwa mereka tidak percaya tentang keberadaan Covid-19. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ini berkesesuaian dengan teori *Health Belief Model* yang dikembangkan Hochbaum, Rosenstock, dan Kegels yang mengatakan bahwa masyarakat akan melakukan suatu tindakan apabila mereka percaya bahwa penyakit itu bisa menulari mereka (rentan terhadap penyakit) dan jika tertular dapat berakibat kematian.⁽¹⁸⁾ Namun saat ini banyak diantara mereka yang kurang percaya akan keberadaan Covid-19 yang dapat menyebabkan kematian. Dengan adanya persepsi semacam inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpatuhan akan protokol kesehatan di tengah masyarakat.

Keadaan semacam ini, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dicky yang menganalisa dan menginterpretasi mekanisme psikologis tentang persepsi masyarakat tentang keberadaan Covid-19 di Jakarta dengan membagi menjadi tiga kategori yaitu pertama: Bias kenormalan (*normalcy bias*), orang masih percaya bahwa Covid-19 ini merupakan suatu kejadian yang masih bisa diatasi. Kondisi saat ini diyakini masih biasa-biasa saja (masih normal seperti sebelumnya). Mereka yakin tidak akan terkena Covid-19 demikian juga teman-teman lainnya.⁽¹⁹⁾ Adanya pemikiran semacam inilah yang membuat masyarakat menjadi tidak patuh terhadap protokol Covid-19. Sama halnya dengan persepsi masyarakat di Lombok Tengah yang menganggap bahwa wabah Covid-19 ini belum seberapa apabila

dibandingkan dengan wabah-wabah yang pernah menimpa masyarakat dimasa lalu sesuai dengan telah dipaparkan oleh informan sebelumnya. Selain itu ada juga bias optimisme yang merupakan suatu keyakinan (*over-confident*) bahwa seseorang terlalu optimis untuk memperoleh hasil yang positif dibanding hasil yang negatif. Masyarakat terlalu yakin bahwa Covid-19 tidak akan menyentuhnya. Akibatnya mereka menjadi abai dalam mematuhi protokol Covid-19. Terakhir adalah rendahnya rasa untuk melakukan kontrol perilaku (*sense of behavior control*). Walaupun sebenarnya mereka telah sadar dan memiliki alat pelindung diri akan tetapi mereka merasa bahwa setelah sampai di tempat umum, orang-orang yang berkerumun disitulah yang akan mengendalikan keadaan. Rasa semacam inilah yang membuat motivasi mereka menurun untuk melakukan tindakan protektif guna mencegah penularan Covid-19.

Pemahaman Keagamaan

Sebagai mana kita ketahui bahwa agama merupakan petunjuk (*way of life*) bagi kehidupan kita. Akan tetapi karena adanya perkembangan zaman, banyak hal-hal yang terjadi saat ini belum pernah terjadi pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Akibatnya tidak terdapat teks yang kongkrit baik dalam kitab suci Alqur'an maupun pada Sunah Rasulullah sebagai pedoman untuk menyikapi masalah yang baru muncul tersebut. Oleh karena itu menurut ketentuan agama diperlukan apa yang disebut fatwa para alim-ulama. Sejak WHO mendeklarasikan bahwa Covid-19 merupakan masalah darurat kesehatan masyarakat secara global maka semua negara di dunia meresponnya dalam berbagai bentuk kebijakan dan kegiatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meresponnya dalam bentuk fatwa yang menghimbau agar semua masyarakat muslim tidak sholat berjamaah di masjid atau musholla. Hal ini sangat penting mengingat jumlah masyarakat muslim di Indonesia mencapai 87% dari 270 juta penduduk Indonesia. Seandainya 87% ini taat pada fatwa MUI maka jumlah kontak akan jauh berkurang sehingga peluang terjadinya penularan Covid-19 akan sangat kecil. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang tidak taat meskipun fatwa MUI ini telah didukung oleh semua ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Dalil yang mendasari munculnya fatwa ini adalah: "menghindari bahaya/mudharat lebih utama dari pada mencari kemashlahatan".⁽²⁰⁾

Saat kota Surabaya melaksanakan PSBB ternyata 70-80% tempat-tempat ibadah baik masjid, gereja dan lainnya masih di buka untuk beribadah.⁽²¹⁾ Begitu juga yang terjadi di kawasan lain di Indonesia. Dari kondisi ini dapat dikatakan bahwa sebagian masyarakat muslim tidak mematuhi Fatwa MUI.

Banyaknya masyarakat muslim yang tidak patuh pada Fatwa MUI sebelum masa *new normal* diberlakukan disebabkan karena adanya perbedaan pendapat tokoh-tokoh agama setempat dalam memaknai dalil-dalil baik yang bersumber dari sunah maupun kitab suci. Adanya dalil yang mengatakan bahwa apapun yang menimpa kita saat ini, baik wabah ataupun bencana lainnya, sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi ketakutan terhadap Covid-19 dianggap tidak perlu, justru yang perlu ditakuti adalah Allah. Dalil inilah yang kemudian menyebabkan mereka lalai untuk berupaya menghindari hal tersebut. Tentu saja ini merupakan perbedaan sudut pandang dalam hal cara memahami sebuah dalil.

Dengan tidak memperdulikan usaha (ikhtiar) seperti karantina (isolasi diri), jaga jarak (*social distance*) dan pemakaian masker, maka sesungguhnya mereka telah terjebak dalam *fatalistic-deterministic* dimana mereka pasrah dalam konotasi negatif. Tokoh-tokoh agama setempat umumnya merupakan tokoh panutan. Pendapat, sikap, maupun tindakannya akan menjadi sebuah norma subyektif yang mempengaruhi niat masyarakat setempat untuk berperilaku tertentu apakah patuh atau tidak terhadap suatu himbauan, fatwa atau aturan. Hal ini sesuai dengan Azjen dalam *Theory Of Planned Behavior* (TPB) yang mengatakan bahwa norma subyektif merupakan salah satu faktor yang menentukan minat seseorang untuk mengadopsi perilaku tertentu⁽¹⁸⁾. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aula (2020) yang mengemukakan bahwa tokoh agama memiliki peran yang penting dalam proses transfer informasi. Tokoh agama dapat mempengaruhi tindakan masyarakat yang ada di dalam komunitasnya sehingga segala hal yang disampaikan oleh para tokoh agama ini akan memiliki kecenderungan untuk diikuti.⁽²²⁾ Peranan ini juga dapat diaplikasikan di era pandemi Covid-19 ini dimana para tokoh agama digandeng bersama oleh pemerintah dalam memberikan edukasi guna menekan angka penyebaran Covid-19.

Euforia tentang New normal

Terjadinya salah persepsi masyarakat tentang *new normal* ini merupakan akibat dari proses komunikasi yang kurang jelas. Bahkan ada kesimpang siuran informasi yang diterima oleh masyarakat akibat proses komunikasi massa melalui media elektronik tanpa ditindak lanjuti dengan komunikasi kelompok atau perorangan secara *face to face*.

Menurut Nurcahyo istilah-istilah impor seperti *new normal*, *lockdown*, dimana secara komunikasi publik memang membingungkan masyarakat. Umumnya para pakar maupun para politisi menggunakan bahasa atau istilah-istilah yang sulit difahami oleh masyarakat bawah. Akibatnya informasi yang diterima oleh masyarakat bawah menjadi simpang siur bahkan multi tafsir tanpa proses konfirmasi sehingga konsep *new normal* bisa salah difahami.⁽²³⁾

Banyak masyarakat bawah mengira bahwa *new normal* sebagai suatu momen kembali ke keadaan normal seperti semula sebelum Covid-19 menyerang. Paham ini kemungkinan timbul akibat ketidaklengkapan informasi/pesan yang diterima oleh masyarakat. Dalam teori komunikasi mengatakan bahwa komunikasi yang baik ditandai dengan adanya kesamaan antara pesan (*message*) yang disampaikan oleh komunikator dengan makna (*meaning*) yang diterima oleh komunikan. Mulyana mengatakan bahwa makna (*meaning*) yang ditangkap oleh khalayak melibatkan penafsiran yang bervariasi dalam pembentukan makna.⁽²⁴⁾ Oleh karena itu komunikator (dalam hal ini pemerintah, gugus kendali

Covid-19) harus memberikan informasi yang jelas dan tidak bersifat multi tafsir yang bisa mempengaruhi perbedaan persepsi masyarakat sehingga message yang disampaikan pemerintah berbeda dengan meaning yang diterima masyarakat. Kesimpangsiuran informasi tentang keberadaan Covid-19.

Petugas kesehatan belum memiliki bahasa yang sama dalam menyebarkan informasi tentang Covid-19. Ada yang mengatakan bahwa Covid-19 nyata adanya dan berbahaya, ada pula yang mengatakan bahwa Covid-19 adalah penyakit yang dapat disembuhkan dengan bahagia jadi masyarakat tidak perlu panik. Berdasarkan pendapat yang kedua ini masyarakat menyimpulkan bahwa Covid-19 bukan penyakit yang berbahaya yang harus ditakuti. Pendapat inilah yang paling dipercaya dan paling banyak diikuti oleh masyarakat awam. Dugaan mereka semakin kuat bahwa Covid-19 adalah sebuah konspirasi dengan maksud tertentu. Akibatnya kepercayaan masyarakat akan keberadaan Covid-19 sebagai wabah semakin menurun.

Mereka lebih banyak yang mengikuti pendapat yang kedua bahwa Covid-19 tidak berbahaya. Rata-rata mereka mengatakan bahwa siapa lagi yang akan kita percaya kalau bukan pada ahlinya. Ahli saja mengatakan bahwa Covid-19 bisa sembuh dengan bahagia jadi untuk apa bersusah payah membeli *hand sanitizer* sementara penghasilan terus menurun karena penumpangnya jarang. Hal ini sesuai dengan teori *The Communication Behavior Change Model* dari McGuire yang mengatakan bahwa suatu informasi bukan saja dilihat dari substansinya akan tetapi siapa yang menyampaikannya. Apabila suatu informasi itu disampaikan oleh orang yang dianggap kredibel akan lebih mudah diterima dan dipercaya oleh masyarakat.⁽²⁵⁾

Kesimpangsiuran Informasi tentang Keberadaan Covid-19

Kesimpangsiuran informasi dapat membingungkan masyarakat. Mereka tidak bisa menentukan mana informasi tentang keberadaan Covid-19 yang benar dan salah. Disinilah peran dari tokoh-tokoh setempat sangat menentukan opini masyarakat. Terkadang tokoh-tokoh penting setempat bisa berperan negatif dengan memberikan informasi yang salah pada masyarakat awam. Kadang-kadang afiliasi politik para tokoh masyarakat sangat menentukan pendapat mereka tentang keberadaan covid-19 yang kemudian menular pada lapisan masyarakat awam. Hal inilah yang membuat persepsi dan pendapat masyarakat tentang covid-19 menjadi terbelah. Bagi mereka yang mempercayai pendapat yang kontra produktif umumnya jarang patuh melaksanakan protokol kesehatan terkait Covid-19. Keadaan ini memperbanyak jumlah masyarakat yang tidak lagi menerapkan 3M (menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan).

Kesimpangsiuran pendapat di masyarakat disebabkan oleh ketidaksempurnaan komunikasi publik oleh pemerintah terutama maraknya berbagai versi informasi yang tersebar di media sosial yang menimbulkan munculnya informasi yang bersifat *hoax*.⁽²⁶⁾ Masyarakat kadang mengakses informasi terkait dengan rumor, dugaan, dan spekulasi yang berhubungan dengan Covid-19. Seharusnya kesimpangsiuran informasi semacam ini harus segera ditindak lanjuti oleh pemerintah serta melakukan *counter* dengan menyampaikan informasi yang benar secara detail. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Neil (2000) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan adalah pemahaman tentang instruksi.⁽¹³⁾ Hal ini dapat disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam memberikan informasi secara jelas dan lengkap sehingga muncul berbagai informasi di masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan nilai kebenarannya.

Selanjutnya para pemangku kebijakan tidak mempunyai persepsi dan visi yang sama tentang bahaya virus ini bahkan ada pejabat yang mengatakan Indonesia aman dari ancaman virus dan pejabat lainnya memiliki pendapat berbeda. Pandangan dan sikap yang terpolarisasi semacam ini berakibat pada sikap dan pandangan masyarakat menjadi terpecah belah.⁽²⁷⁾ Tidak mengherankan jika hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan sehingga kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan.

Faktor Sosial-Ekonomi dan Politik

Pada awal merebaknya kasus Covid-19 di Indonesia, banyak ahli kesehatan yang mengusulkan agar pemerintah Indonesia melakukan *lockdown* wilayah. Namun dengan tegas Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan *lockdown* wilayah dengan mempertimbangkan dampak ekonomi yang akan terjadi.⁽²⁸⁾ Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump pada sebuah siaran televisi, bahwa beliau tidak akan melakukan *lockdown* di Kota New York karena khawatir akan meningkatnya kasus bunuh diri pada warganya akibat kehilangan pekerjaan.⁽²⁹⁾ Kasus bunuh diri semacam ini menurut Trump akan lebih dahsyat jika dibandingkan dengan kematian akibat Covid-19.

Sebagai pengganti dari *lockdown* wilayah, Indonesia menerapkan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada wilayah-wilayah yang masuk zona merah yaitu wilayah yang penyebaran Covid-19 dianggap besar atau rawan.⁽³⁰⁾ Program ini dilakukan selama 14 hari sesuai masa inkubasi Covid-19 dan bisa diperpanjang bila keadaannya masih masuk dalam kategori zona merah.

Selama masa PSBB, warga diharapkan untuk berdiam dirumah saja. Pemerintahpun berusaha menyediakan kebutuhan pokok masyarakat agar masyarakat tidak berkeliaran di luar rumah untuk mencari kebutuhan hidup sehari-hari. Ojek *online* pun diperuntukkan bagi pengangkutan kebutuhan pangan yang dipesan secara daring bukan untuk mengangkut penumpang. Hal ini untuk mencegah mobilitas penduduk yang bisa menjadi ajang penularan Covid-19.

Upaya PSBB ini tidak serta merta mencegah mobilitas penduduk secara bermakna. Dari hasil pemantauan satelit ternyata pergerakan penduduk dari ibu kota ke daerah-daerah masih tinggi. Kejadian ini tidak lepas dari faktor sosial ekonomi dan budaya bangsa kita, bukan semata-mata faktor ketidaksadaran mereka akan pentingnya mengurangi mobilitas dalam rangka mencegah penularan Covid-19.

Menjelang perayaan hari besar keagamaan seperti hari raya idul fitri tahun 2020, pemerintah semakin sulit membendung mobilitas penduduk yang akan mudik atau pulang kampung. Mudik menjelang lebaran sudah merupakan kebiasaan secara sosial keagamaan yang sangat kuat dan tidak mungkin dihilangkan. Apalagi pada momen tersebut, mereka yang baru pulang dari rantauan membagi-bagikan semacam oleh-oleh/hadiah kepada sanak saudara yang kurang mampu. Dengan demikian mudik lebaran bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sosial-keagamaan, akan tetapi memiliki fungsi secara ekonomi untuk membantu sanak keluarga yang kurang mampu.

Saat itu juga ada kebijakan pemerintah yang membingungkan bahwa pemerintah melarang warga mudik tetapi membolehkan warga pulang kampung.⁽³¹⁾ Terlepas dari kedua terminologi yang digunakan, dalam benak masyarakat berkata bahwa baik mudik maupun pulang kampung punya tujuan yang sama yaitu ingin bertemu dengan sanak saudara dan dilakukan pada momen yang sama yaitu menjelang lebaran. Dengan demikian tidak akan ada perbedaan efek antara mudik dan pulang kampung terhadap transmisi Covid-19.

Adanya statemen berbau politik di media sosial juga turut memberikan andil akan kepercayaan masyarakat tentang keberadaan Covid-19, dimana dalam sebuah statemen ada yang menuduh bahwa Covid-19 tidak adil.

..... *“Covid-19 hanya bisa menulari anak-anak sekolah sehingga sekolah-sekolah ditutup, dia hanya bisa menulari orang-orang yang beribadah sehingga tempat-tempat ibadahpun ditutup pula. Akan tetapi begitu ada giliran pilkada kok jalan terus kenapa tidak ditunda?. Kemana kamu Covid-19 saat itu?”*

Apabila postingan semacam ini dibaca oleh masyarakat awam atau masyarakat yang dahulunya tidak mendukung pemerintah maka akan terkesan bahwa pemerintah melakukan politik diskriminatif. Statemen semacam ini justru akan menyulitkan upaya pemerintah dalam menanggulangi transmisi Covid-19.

Begitulah betapa rumitnya faktor-faktor yang terkait dengan upaya penanggulangan Covid-19 ini. Kesimpangsiuran opini yang muncul di media sosial dan media masa yang dilatari oleh kepentingan sosial-ekonomi dan politik tentang Covid-19 membuat pola pikir, persepsi dan opini masyarakat lapisan bawah semakin terpolarisasi. Dalam benak mereka makin terpatir bahwa keberadaan Covid-19 ini sesungguhnya antara “ada” dan “tiada”, dalam arti mereka belum yakin sepenuhnya bahwa Covid-19 memang ada. Adanya hanya di media masa, bukan di alam nyata. Karena itulah mereka mengatakan: “kita tidak perlu menutup hidung dan mulut dengan masker, yang perlu kita tutup adalah mata dan telinga karena dari situlah Covid-19 bisa menular”.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah. Kelima faktor tersebut antara lain persepsi masyarakat akan keberadaan Covid-19, pemahaman keagamaan, euforia tentang *new normal*, kesimpangsiuran informasi tentang keberadaan Covid-19 dan faktor sosial ekonomi dan politik secara bersama-sama menyebabkan banyaknya masyarakat di Lombok Tengah yang tidak patuh dalam melaksanakan protokol kesehatan di era *new normal* ini.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyarankan agar pemerintah membuat rancangan komunikasi secara khusus agar tidak terjadi kesimpangsiuran persepsi dan opini masyarakat tentang keberadaan Covid-19 ini, sehingga mereka mau berpartisipasi secara aktif dalam penanggulangannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Tu H, Tu S, Gao S, Shao A, Sheng J. Current epidemiological and clinical features of COVID-19; a global perspective from China. *J Infect.* 2020;81(1):1–9.
2. Ahmed SS. The Coronavirus Disease 2019 (Covid-19): A Review. *J Adv Med Med Res.* 2020;2019(May):1–9.
3. Lee K, Worsnop CZ, Grépin KA, Kamradt-Scott A. Global coordination on cross-border travel and trade measures crucial to Covid-19 response. *Lancet.* 2020;395(10237):1593–5.
4. Djalante R, Lassa J, Setiamarga D, Sudjatma A, Indrawan M, Haryanto B, et al. Review and analysis of current responses to Covid-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Prog Disaster Sci.* 2020;6:100091.
5. Indonesia.go.id. Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik [Internet]. Indonesia.go.id. 2020. p. 10110. Available from: <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>
6. WHO. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) World Health Situation Report - 1. WHO Indones Situat Rep. 2020;2019(March):8.
7. Yurianto A. Empat Strategi Pemerintah Atasi Covid-19 [Internet]. 2020 [cited 2020 Apr 25]. Available from: <https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid-19>
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). 2020;

9. Baswedan A. Anies Baswedan Sebut Mobilitas Orang Masih Tinggi Saat PSBB [Internet]. 2020 [cited 2020 Apr 28]. Available from: <https://metro.tempo.co/read/1331157/anies-baswedan-sebut-mobilitas-orang-masih-tinggi-saat-psbb>
10. Blass T. The Milgram Paradigm After 35 Years: Some Things We Now Know About Obedience to Authority. *J Appl Soc Psychol*. 1999;29(5):955–78.
11. Taylor, Shelley E.; Peplau, Letitia Anne; Sears DO. TWBS. Social psychology. dialihbaha. Jakarta: Kencana; 2009.
12. Notoatmodjo. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta; 2012.
13. Neil N. Psikologi Kesehatan. Jakarta: Buku Kedokteran EGC; 2000.
14. Kozier EBS. Buku Ajar Fondamental Keperawatan : Konsep, Proses & Praktik. Jakarta: Buku Kedokteran EGC; 2010.
15. Djalillah S. Wagub Tuntut Tanggung Jawab Pemkot Mataram. 2020; Available from: <https://radarlombok.co.id/wagub-tuntut-tanggung-jawab-pemkot-mataram.html>
16. Rakhmat. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya; 2005.
17. Restiyanti P dan JJO. I. Perilaku Konsumen. Yogyakarta: ANDI; 2005.
18. Glanz, K., Rimer, B.K., Viswanath K. Health Behaviour and Health Education: Theory, Research and Practice 4th Ed. San Francisco: Jossey-bass; 2008.
19. Palupessy D. Penelitian Ungkap Terjadi Bias Persepsi Warga Menyikapi Covid-19 [Internet]. 2020. Available from: sumber: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/317653/penelitian-ungkap-terjadi-bias-persepsi-warga-menyikapi-covid-19>
20. Callistasia W. Virus corona: MUI keluarkan fatwa penyelenggaraan ibadah di tengah wabah Covid-19 [Internet]. 2020 [cited 2020 Apr 20]. Available from: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51867023>
21. Afrizal. Evaluasi PSBB, Masih Banyak Warga yang Melanggar [Internet]. 2020. Available from: <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/evaluasi-psbb-masih-banyak-warga-yang-melanggar>
22. Aula SKN. Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia. *Living Islam J Islam Discourses* -. 2020;3(1).
23. Nurcahyo A. Pendekatan Kebijakan Penanganan Covid-19 Dianggap Terlalu Dominan Politik [Internet]. 2020. Available from: <https://www.beritasatu.com/nasional/641191/pendekatan-kebijakan-penanganan-covid19-dianggap-terlalu-dominan-politik>
24. Mulyana D. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya; 2000.
25. Kaplan, Robert. M. et al. Health and Human Behavior. New York: McGraw-Hill; 1993.
26. Fakhruroji M, Tresnawaty B, Sumadiria ASH, Risdayah E, Kunci K. Strategi Komunikasi Publik Penanganan COVID-19 di Indonesia : Perspektif Sosiologi Komunikasi Massa dan Agama. *Ilmu Komun UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. 2020;1(1):1–11.
27. Sumadiria AH. Sosiologi Komunikasi Massa. Bandung: Simbiosis Rekatama Media; 2014.
28. Ihsanuddin. Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown [Internet]. 2020 [cited 2020 Apr 28]. Available from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/02/05405561/jokowi-akhirnya-blak-blakan-soal-alasan-tak-mau-lockdown?page=all>
29. Wirawan KM. Wabah Covid-19, Trump Batalkan Lockdown Kota New York [Internet]. [cited 2020 Apr 2]. Available from: <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/29/120857270/wabah-covid-19-trump-batalkan-lockdown-kota-new-york?page=all>
30. Azanella LA. 9 Daerah di Indonesia yang Terapkan PSBB karena Virus Corona [Internet]. 2020 [cited 2020 Apr 10]. Available from: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/080408865/9-daerah-di-indonesia-yang-terapkan-psbb-karena-virus-corona?page=all>
31. Ardito R. Jokowi Bedakan Mudik dan Pulang Kampung, Pemudik Dinilai Bisa Bohongi Petugas [Internet]. Available from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/23/12252551/jokowi-bedakan-mudik-dan-pulang-kampung-pemudik-dinilai-bisa-bohong-petugas?page=all>